

Perilaku korupsi: Tinjauan psikologi, sosial, politik dan budaya

Eben Ezer Nainggolan

Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

E-Mail: ebenezer@untag-sby.ac.id

Published:
1 Mei 2024

Abstract

Corruption behavior in Indonesia continues to increase from year to year in terms of the quantity or number of people committing corruption and the quality or nominal amount of corruption. Corruption has a severe impact on all aspects of people's lives. Therefore, research aimed at explaining corruption is needed. The purpose of this study is to provide an explanation of corruption behavior from various disciplines. This research is a literature review study. Research data were collected through search engines such as Google Scholar. Relevant articles were then analyzed using hermeneutics. The findings of this study indicate that many factors can cause corruption, so a multidisciplinary approach is needed. The implications of the research are discussed.

Keywords: corrupt behavior; psychological approach; social approach; economic approach; cultural approach

Abstrak

Perilaku korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik secara kuantitas atau jumlah orang yang melakukan korupsi, maupun secara kualitas atau jumlah nominal yang dikorupsi. Perilaku korupsi memiliki dampak yang serius dalam semua aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan perilaku korupsi sangat diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan perilaku korupsi dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian ini merupakan penelitian literatur review. Data penelitian dikumpulkan melalui mesin pencarian seperti google scholar. Artikel yang relevan kemudian dianalisis menggunakan hermeunetik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dapat disebabkan oleh banyak faktor, sehingga diperlukan pendekatan multidisiplin. Implikasi penelitian dibahas.

Kata kunci: perilaku korupsi; pendekatan psikologi; pendekatan sosial; pendekatan ekonomi; pendekatan budaya

Copyright © 2024. Eben Ezer Nainggolan

Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena global. Tidak satupun negara di dunia yang bebas dari persoalan korupsi, yang imun terhadap korupsi, baik negara kaya maupun negara miskin, negara maju ataupun negara berkembang (Indriati, 2012). Perbedaan persoalan korupsi di berbagai negara hanyalah mengenai besar-kecil atau parah-tidaknya korupsi yang dihadapi negara bersangkutan; sedangkan kompleksitasnya sama. *The 2018 Corruption Perception Index*, yang dipublikasikan oleh *Tranparancy International* mengkonfirmasi hal tersebut (<https://knoema.com/atlas/maps/Corruption-perceptions-index>). Dengan menggunakan skala penilaian dari 0 (*highly corruption*) hingga 100 (*very clean*), tidak satupun negara yang meraih

skor 100. Denmark dan Newzeland yang berturut-turut menempati peringkat satu dan dua negara terbersih dalam persoalan korupsi berturut-turut memiliki skor indeks persepsi korupsi 88 dan 87. Dilaporkan pula bahwa berdasarkan skor indeks persepsi korupsi ini lebih dari dua per tiga negara yang disurvei memiliki skor kurang dari 50; sedangkan skor rata-rata indeks persepsi korupsi di seluruh negara yang disurvei adalah 43. Bagian laporan yang menyedihkan adalah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir hanya sebagian kecil yang mengalami kemajuan berarti (20 negara), sebagian besar negara tidak mengalami kemajuan yang berarti, bahkan sejumlah negara (16 negara) justru mengalami kemunduran.

Lambsdorff (2006) mengemukakan beberapa konsekuensi yang timbul dari perilaku korupsi adalah ketidakadilan pendapatan (*inequality of income*), pendapatan per kapita rendah, tingkat investasi rendah, penyimpangan alokasi anggaran, kualitas sektor publik rendah, distorsi pasar, maraknya pasar gelap, dan penggelapan pajak. Selanjutnya Blackburn & Forgues-Puccio (2009) menyebutkan bahwa dari perspektif bisnis, korupsi telah merusak atau menghancurkan *incentives* dan *opportunities*, menghambat inovasi dan alih teknologi yang selanjutnya menciptakan lingkungan bisnis yang buruk. Staphenurst, dkk. (2006), secara lebih meyakinkan, menyatakan bahwa korupsi tidak saja berkontribusi terhadap pelemahan ekonomi, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, para pemimpin yang illegitimate, dan kejahatan yang terorganisir, tapi juga berkontribusi pada meningkatnya polarisasi sosial; dan dalam kasus yang ekstrim, dapat memicu pergolakan politik. Menurut *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), di seluruh dunia telah terjadi penggelapan pajak sebesar USD 2,1 triliun di tahun 2009, satu besaran yang setara dengan GDP Inggris (UNODC, 2011).

Merujuk pada hal tersebut memahami faktor-faktor yang patut diduga sebagai penyebab ataupun yang mempengaruhi tindak atau perbuatan korupsi menjadi penting. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut strategi pencegahan dapat dirancang dan dilaksanakan. Judge, dkk. (2011), misalnya, berdasarkan *overview* atas 42 studi yang berlangsung pada rentang waktu 11 tahun mulai Tahun 1995 hingga Tahun 2006 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak korupsi, mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi faktor ekonomi, faktor politik dan hukum, faktor social, dan faktor budaya.

Mengacu pada temuan tersebut setidaknya haruslah disadari bahwa fenomena korupsi bukanlah fenomena yang berdimensi tunggal, melainkan fenomena yang multidimensional. Dengan demikian pemahaman terhadap fenomena tersebut perlu dilakukan secara multi disiplin. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum bahwa solusi yang baik hanya diperoleh melalui pemahaman yang benar. Tulisan ini bertujuan untuk memahami fenomena korupsi melalui analisis berdasarkan pendekatan interdisiplin, yaitu pendekatan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian literatur review yang bertujuan mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan perilaku korupsi. Proses pengumpulan literatur dilakukan oleh peneliti menggunakan *google scholar*. Naskah-naskah yang relevan dengan topik penelitian kemudian dianalisis menggunakan hermeunetik guna mendapatkan kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Kebanyakan pendekatan menganggap bahwa satu permasalahan sosial ada sebagai satu kondisi objektif. Kondisi objektif tersebut dilihat sebagai memiliki sifat yang secara intrinsik berbahaya bagi masyarakat. Istilah sosial yang sering digunakan untuk hal ini adalah disfungsi, patologi, disorganisasi, atau deviasi. Tugas para ahli (sosial) adalah mengidentifikasi kondisi yang membahayakan tersebut dan memecahnya (resolve) ke dalam elemen-elemen atau bagian-bagian yang esensial. Analisis ini biasanya disertai dengan identifikasi terhadap kondisi-kondisi yang menimbulkan atau menjadi sebab dari permasalahan dan usulan mengenai cara menangani permasalahan tersebut. (Blumer, dalam Jiang 2017).

Gary dan Kaufman (1989) juga menyatakan, "*corruption is widespread... not because their people are different from people elsewhere but because conditions are ripe for it*". Melalui pernyataan ini ingin dinyatakan bahwa yang menjadi penyebab perilaku korupsi sesungguhnya adalah kondisi-kondisi eksternal. Untuk hal ini, para ahli telah melakukan hal terbaik yang dapat mereka lakukan untuk meneliti/ memahami kondisi eksternal sebagai sebab korupsi tersebut. Setelah menganalisa sifat objektif dari persoalan sosial, mengidentifikasi sebab-sebabnya, dan mengemukakan cara mengatasi permasalahan tersebut, para ahli percaya bahwa mereka telah menunaikan misi ilmiah mereka. Sejak awal penelitian mengenai korupsi, para ahli terus mencari sebab-sebab korupsi. Para ahli dari berbagai disiplin berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan: mengapa korupsi?

Pendekatan Psikologi

Mengingat bahwa pada akhirnya perbuatan korupsi itu, terlepas dari bagaimana prosesnya, akan dieksekusi oleh orang-individu, maka pemahaman korupsi yang fokus pada orang-individu, yang menjadi fokus pendekatan psikologi, menandai penting untuk dipahami. Berusaha memahami perilaku korupsi dari pendekatan individu, Rose-Ackerman (1997) dan Klitgaard (1988) menyatakan bahwa alasan seseorang melakukan korupsi adalah sederhana yaitu mereka melihat bahwa potensi keuntungan (*benefit*) yang akan mereka peroleh jauh melebihi konsekuensi (*cost*) yang harus mereka bayar ketika perbuatan korupsi mereka diketahui. Pernyataan ini merupakan inti dari *Rational Choice Theory* yang menyatakan bahwa individu adalah pribadi yang rasional yang melakukan kalkulasi untung-rugi. Boleh jadi, negara-negara (seperti China) yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, dengan pertimbangan bahwa 'mati' merupakan harga tertinggi yang mungkin dapat ditanggung seseorang atas perbuatan yang dilakukan. Tetapi sebagaimana diketahui korupsi di China juga tidak hilang sama sekali. Jika hukuman mati, sebagai harga tertinggi yang mungkin dapat ditanggung seseorang, tidak membuat seseorang berhenti dari keinginan berbuat korupsi, apa yang dapat menghentikan seseorang dari keinginan berbuat korupsi? Mungkinkah 'mati' memang bukan harga tertinggi yang dapat ditanggung oleh seseorang atas perbuatan yang dilakukan? Atau, adakah penjelasan yang belum diketahui tentang apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa seseorang melakukan korupsi? Setidaknya dari teori rational choice dari Ackerman, Mercer, J. (2005) diketahui bahwa "*rational choice theories explain how one should reason, not how one actually reasons*", but not adequately explain how people make decisions to reach an outcome".

Pendekatan Ekonomi terhadap Korupsi

Para ahli ekonomi mengklaim bahwa yang menjadi biangkeladi dari perilaku korupsi adalah pasar yang tidak sempurna (*incomplete market*), pasar yang diganggu, pasar yang

terhalangi, yang direcoki (*onstructed market*); bukan pasarnya itu sendiri. Pasar yang berkembang secara sempurna, yang memiliki semua karakteristiknya (*genuine and full-fledged market*), yang didasari jual-beli atau pertukaran yang adil (*fair exchange*), kompetisi yang equal, secara diamterik bertentangan dengan perilaku korupsi. Sebagai contoh kasus adalah masalah korupsi yang terjadi di Cina. Setelah melakukan transformasi diri dari negara dengan sistim ekonomi tertutup (*planned economic system*) menjadi negara dengan sistim ekonomi terbuka secara penuh (*full market economic system*), korupsi di negara tersebut secara perlahan mengalami penurunan bersamaan dengan hilangnya peluang-peluang korupsi yang terkait dengan aturan-aturan yang tidak jelas, perselisihan paham dan munculnya koordinasi yang lebih baik dan transparan. Negara tetap memiliki peran dalam aktivitas ekonomi maupun alokasi sumber-sumber daya dalam masa transisi. *Dual-track system* selalu digunakan sebagai sebuah pengembangan. Dengan berkurangnya dominansi dari pemerintah atau pejabat-pejabat negara kepada pasar, aktivitas ekonomi menjadi lebih bersih. Karenanya perubahan-perubahan institusional dalam sistem ekonomi sangat diperlukan untuk suatu gerakan antikorupsi.

Pendekatan Politik

Para ahli politik menyatakan bahwa sebuah sistim politik yang irasional adalah sumber dari perilaku korupsi. Sistim politik yang dimaksud adalah sistim politik yang memberi kepada pemerintah atau pejabat negara suatu kekuasaan atau kewenangan yang berlebihan atau terlalu besar, sedemikian rupa sehingga kontrol (*check and monitoring*) terhadap perilaku pemerintah dan atau pejabat negara menjadi suatu hal yang sulit. Tidak adanya transparansi dalam administrasi dan demokrasi, sektarianisme, favoritisme/ nepotisme diidentifikasi sebagai faktor-faktor penyebab korupsi. Desentralisasi dan sentralisasi yang berlebihan juga dipandang sebagai penyebab korupsi oleh para ahli politik. Sebagai misal, Wade (1977) mengemukakan bahwa struktur pemerintahan yang *top-down* yang *over-centralized* adalah yang bertanggung jawab atas korupsi yang berlangsung di India. Bruckerner (1999), sebagai contoh lain, menyatakan bahwa korupsi akan menjadi masalah bagi para pemerintah daerah terkait dengan desentralisasi.

Pendekatan Sosiologis

Topik klasik bagi sosiologi menyangkut korupsi adalah *inequality* atau ketimpangan sosial. Bagi para ahli sosiologi, *inequality* selalu berpihak kepada kelompok kaya (*the rich group*) atau kelompok yang memerintah (*the rulling group*). Sebagaimana dikemukakan oleh Glaeser dkk., (2003) "*inequality is detrimental to the security of property rights, and therefore to growth, because it enables the rich to subvert the political, regulatory, and the legal institutions of society for their own benefits.*" (Ketidaksetaraan akan mengganggu keamanan hak-hak properti, dan pada gilirannya akan mengganggu pertumbuhan, karena ketidakseimbangan akan memungkinkan kelompok kaya menghancurkan atau merusak institusi politik, hukum dan sistim peraturan-perundangan di masyarakat demi keuntungan pribadi.). Selain itu, para ahli sosiologi juga selalu memberi perhatian pada peran *inequality* dalam *breeding corruption*. You dan Khagram (2005) mengemukakan bahwa kelompok kaya, baik sebagai individu atau perusahaan dapat menggunakan suap (*bribery*) atau koneksi untuk mempengaruhi proses penerapan hukum (*bureaucratic corruption*) dan 'membeli' interpretasi hukum sebagaimana yang diinginkan (*judicial corruption*).

Dari mana datangnya *inequality* ini? Para kelompok Marxis ortodoks mengemukakan bahwa korupsi berakar dari *power relation* bukan dari *production relations*. Dinamika korupsi berlangsung di dalam eksploitasi sistim tersebut. Ini dapat terjadi bahkan pada sistim

pemerintahan sosialis China dimana para pejabat negara menggunakan kewenangan publiknya (*public power*) untuk mengeksploitasi keuntungan ekonomi (*economic gains*).

Pendekatan Budaya

Para ahli budaya mengemukakan bahwa budaya lokal tertentu adalah yang bertanggung jawab atas merajalelanya korupsi. Tanzi (1995), mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan di beberapa negara secara kultural sedikit banyak cenderung memiliki 'arms-length economic relationships', yang pada gilirannya akan menjadikan korupsi melekat atau berurat-berakar dalam perilaku. Selfishness dan penekanan pada personal relationships di dalam budaya diklaim sebagai kunci penting yang mempengaruhi perilaku korupsi masyarakat.

Banyak pihak berpendapat bahwa nilai dan keyakinan, tanpa perubahan, dihantarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya utamanya melalui sosialisasi, dan karenanya dapat dikatakan bahwa salah satu ciri budaya adalah lamban dalam perubahan (Guiso, dkk., 2006). Namun, interaksi sosial sangat mungkin merubah nilai-nilai budaya dan norma sosial setidaknya partly endogenous (Akerlof, 1980). Tidak hanya nilai yang keyakinan yang mempengaruhi ketaatan terhadap norma sosial, tetapi proporsi masyarakat yang mentaati norma juga mempengaruhi keyakinan individu terhadap nilai yang mendasari nilai tersebut, dan sebagai konsekuensinya, juga kemungkinan bahwa norma tersebut akan mengalami internalisasi ke dalam diri seseorang dan generasi berikutnya. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa budaya mempunyai pengaruh terhadap perilaku korupsi.

Banuri dan Eckel (2012) mengemukakan bahwa Budaya mempengaruhi institusi dan norma sosial, menentukan (dictate) interaksi agen-agen di dalam satu masyarakat, bahkan akan mempengaruhi korupsi yang bagaimana yang akan terjadi (dominan) di dalam satu masyarakat tertentu.

Budaya berinteraksi dengan korupsi melalui insitusi formal dan norma-norma sosial; dua hal yang dapat sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Bagi satu pemerintahan yang berusaha mencegah (menghambat) korupsi, tujuannya adalah *to devise* institusi formal yang dapat mendukung norma sosial yang ada. Aturan formal dan informal bisa jadi tidak saling mendukung satu sama lain. Sebagai ilustrasi hal ini, Wade (1982) menemukan bahwa Indian Villagers (Masyarakat Indian) mendefinisikan perbuatan korupsi sebagai satu perbuatan dimana pejabat meminta uang suap (bribes) dengan besaran yang melebihi besaran yang lazim atau biasanya; yang bertentangan dengan aturan formal yang melarang sogok dengan besaran berapapun. Di Amerika, misalnya, permintaan akan uang suap, berapapun besarnya, akan dianggap sebagai korupsi.

Analisis mengenai sebab-sebab korupsi di atas telah memberikan pemahaman mengenai alasan atau sebab munculnya korupsi. Namun beberapa pendapat perlu dikemukakan terkait hal tersebut. Bila diperhatikan, hal-hal yang dikemukakan sebagai sebab korupsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: pre-corruption, in-corruption, dan after-corruption. Kategori pre-corruption fokus pada struktur kelembagaan atau unit-unit kultural yang menginduksi korupsi. Faktor-faktor ini adalah hal-hal pejabat yang oportunistis atau korupsi yang deterministik, dan faktor-faktor ini ada sebelum korupsi terjadi. Faktor-faktor ini bersifat sangat general dan ada pada level negara (national level). Desentralisasi, reformasi di China, sumber-sumber daya yang terbatas, karakter manusia, adalah beberapa faktor yang paling umum dianggap sebagai penyebab korupsi. Namun, faktor-faktor ini menjadi lemah untuk menjelaskan adanya perbedaan tingkat korupsi di berbagai masyarakat yang secara karakteristik adalah sama. Misalnya kultur Konfusius adalah kultur masyarakat Cina, Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Taiwan, tetapi Hong

Kong dan Singapura adalah termasuk negara dengan tingkat korupsi terendah, atau dengan pemerintahan terbersih di dunia. Jika demikian, dapatkah kita memandang Konfusiunisme sebagai sumber atau penyebab perilaku korupsi?

Dilema yang sama juga terjadi pada faktor sistim pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi adalah proses politik yang berlangsung diseluruh dunia. Hanya sedikit negara dengan sistim desentralisasi yang didapatkan korup. Demokrasi, di sisi lain, tidak dapat menjamin satu pemerintahan yang bersih. Bangladesh adalah negara demokratis, tetapi Bangladesh telah menjadi salah satu negara terkoriup di dunia. Demikian pula halnya dengan pemerintahan otoriter, tidaklah identik dengan korupsi. Cina di bawah pemerintahan diktator Mao terkenal dengan pemerintahannya yang bersih.

Dengan demikian, kapabilitas interpretatif dari faktor-faktor pre-corruption tidaklah memadai. Harus disadari, tidak ada sistem yang sempurna; apakah itu sistim ekonomi, politik-hukum, sosial, atau budaya, tidak ada yang sempurna. Berdasarkan kategori pre-corruption ini, kekurangan-kekurangan ini, tidak terhindarkan, akan menimbulkan korupsi. Namun demikian, hal ini tetap menjadi persoalan, ketika faktanya masih banyak negara dengan pemerintahan yang bersih.

Pada kategori in-corruption, penekanannya ada pada lingkungan kerja di level departement. Ketiadaan *check and balance* pada pemerintahan (administration) diketahui sebagai penyebab korupsi yang sesungguhnya. Transparansi, disiplin-diri, dan pemisahan antara levied fee account dan departement account dikatakan akan efektif dalam memberantas korupsi. Namun, meski Cina telah melakukan reformasi berdasarkan prinsip ini, hasil positif belum didapatkan. Pastilah harus ada faktor-faktor lain yang menyertainya.

Pada kategori after-corruption, fokusnya pada ukuran setelah korupsi terjadi. Bagaimana cara melawan korupsi secara efektif adalah yang menjadi pusat perhatian. Sistim peradilan yang irasional selalu menjadi faktor yang paling diperhatikan. Namun demikian, sistim peradilan yang rasional juga tidak menjamin suatu pemerintahan yang bersih. Semua faktor penyebab korupsi tersebut pada akhirnya dapat menjelaskan korupsi di satu negara tertentu, tetapi tidak dapat menjelaskan korupsi di seluruh negara. Pastilah ada faktor-faktor yang menyertainya.

Kesimpulan

Semakin dapat dimengerti bahwa, setidaknya berdasarkan pendekatan ekonomi, politik-hukum, sosial dan budaya, korupsi adalah fenomena yang sangat kompleks sehingga penanganannya pun menjadi tidak sederhana. Satu hal yang pasti adalah tidak ada, setidaknya belum ada, satu sistim ekonomi, politik-hukum, sosial dan budaya yang sedemikian sempurnanya, yang dapat diterapkan kepada semua (bentuk) masyarakat, dalam rangka memerangi korupsi. Setiap negara harus menemukan sistimnya sendiri yang paling pas untuk menjelaskan dan mengatasi persoalan korupsinya.

Referensi

Blackburn, K. & Forgues-Puccio, G. F., 2009. Why is corruption less harmful in some countries than in others?. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 72, pp. 797-810.

Brueckner, Jan (1999) Fiscal decentralization in LDCs: the effects of local corruption and tax evasion. Dept of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, Mimeo.

- Glaeser, Edward, Jose Scheinkman, Andrei Schleifer (2003) The Injustice of Inequality, *Journal of Monetary Economics* N.50, p199–222. (Carnegie-Rochester Series on Public Policy).
- Gray, Cheryl W. and Daniel Kaufmann (1998) Corruption and Development, in *Finance and Development*, March 1998, The International Monetary Fund, Washington D.C.
- Indriati, E., 2012. *Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. PT Gramedia, Jakarta.
- Jiang, G., 2017. *Corruption Control in Post-Reform China*. Springer Nature Singapore Pte Lt.d. Singapore. DOI 10.1007/978-981-10-4050-4_2.
- Judge, W. Q., McNatt, D. B. & Xu, W., 2011. The antecedents and effects of national corruption: A meta-analysis. *Journal of World Business*, 01, Volume 46, pp. 93-103
- Lambsdorff, J. G., 2006. Causes and consequences of corruption: What do we know from a crosssection of countries?. In: S. Rose-Ackerman, ed. *International Handbook on the Economics of Corruption*. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., pp. 3-51.
- Stapenhurst, R., Johnston, N. & Pelizzo, R., 2006. *The role of parliament in curbing corruption*. Washington D.C.: World Bank Institute.
- Tanzi, Vito (1995) Corruption, Arm's length relationship, and markets, in *The Economics of Organized Crimes*, edited by Gianluca Fiorentini and Sam Peltzman, Cambridge: Cambridge University Press, pp 161–180.
- Transparency International, 2019. Corruption Perception Index. <https://knoema.com/atlas/maps/Corruption-perceptions-index>
- UNODC, 2011. *UNODC estimates that criminals may have laundered US\$ 1.6 trillion in 2009*.
- Wade, Robert (1997) How infrastructure agencies motivate staff: canal irrigation in India and the Republic of Korea, in *Infrastructure Strategies in East Asia*. Ashoka Mody (ed.) World Bank.
- You, Jong-sung and Sanjeev Khagram (2005) A Comparative Study of Inequality and Corruption, *American Sociological Review*, 2005, VOL. 70 (February:136–157).